Revisi UU TNI:

Narasi Keamanan VS Kontrol Sipil

10 Desember, 2025

Felia Primaresti
Manajer Riset dan Program
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)

Kenapa isu ini penting?

KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
Badan Penelitian dan Pengembangan

TENTANG BALITBANG | BERITA DAN MEDIA | PUBLIKASI | KORPRI
REFORMASI BIROKRASI | PELAYANAN PUBLIK

PPID | WEBMAIL

Analisis Revisi UU TNI Untuk Mendukung Kepentingan Nasional

Wednesday, 23 April 2025

AMNESTY INTERNATIONAL

BERANDA | TENTANG KAMI

Oktober 23, 2025

Koalisi: Batalkan Pasal-Pasal Bermasalah UU TNI di MK, Selamatkan Demokrasi dan Negara Hukum

Pada Kamis, 23 Oktober 2025 Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari puluhan advokat dan pegiat hak asasi manusia menjadi kuasa hukum dari delapan pemohon dalam permohonan uji materil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Mahkamah Konstitusi.

YLBHI

PROFIL | INFORMASI | PUBLIKASI | PAPUA | KONTAK | Search...

Siaran Pers

Revisi UU TNI dibentuk Ugal-ugalan dan Bertentangan dengan Konstitusi: MK Harus Batalkan UU TNI

By Admin | May 8, 2025 | 6:28 pm | No Comments

Pemerintah dan DPR Sebut Penyusunan UU TNI Telah Melibatkan Partisipasi Publik

Print

JAKARTA, HUMAS MKRI – Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI Perubahan merupakan RUU yang diajukan berdasarkan urgensi nasional terkait upaya melindungi dan menyelamatkan WNI karena meningkatnya dinamika keamanan regional, penguatan stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber). Selain itu, RUU ini sebagai wujud dari tindak lanjut atas Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021 serta keinginan bersama pembentuk Undang-Undang untuk melanjutkan pembentukan UU TNI (UU 3/2025) yang ditandai dengan telah ditugaskannya Komisi I DPR untuk membahas RUU TNI Perubahan.

???



ini bukan sekadar revisi administratif, tetapi menyangkut desain hubungan sipil–militer pasca Reformasi

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Pertanyaan Penelitian

1. Framing aktor dalam revisi => sebagai pintu masuk untuk memahami legitimasi kebijakan.
2. Relasi kuasa dalam produksi narasi => narasi tidak lahir netral; ia diproduksi oleh aktor yang punya kuasa
3. Rekomendasi untuk kontrol sipil & proses kebijakan yang sehat => penting karena riset bukan hanya diagnosis, tetapi menawarkan solusi



THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Kerangka Teoritis



Narrative Policy Framework (NPF)

setting, characters, plot, moral.



Framing Entman

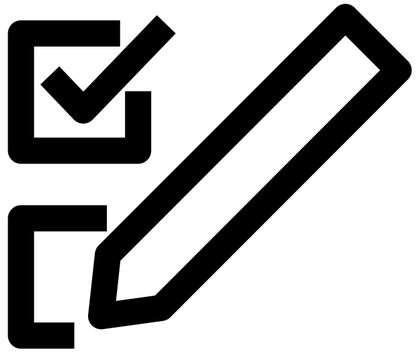
problem, cause, moral, solusi



Relasi Kuasa Foucault

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

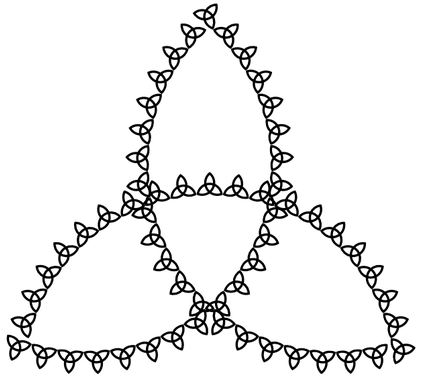
Metode Penelitian



Kualitatif Deskriptif



Analisis Dokumen dan Wawancara



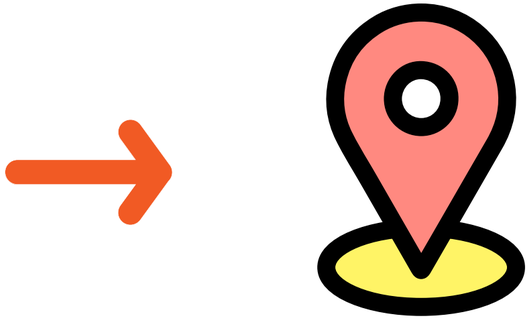
Triangulasi => media, riset lembaga dll.

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Kebijakan=Kontestasi Makna

Jadi.....







Fokus bukan hanya hasil:
bukan cuma soal rekomendasi diterima.

Perhatikan proses :
siapa ngomong, narasi apa yang dipakai, siapa yang menang/terpinggirkan.

Analisis membantu:
bongkar framing & posisi kuasa di balik kebijakan.

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Tabel 1. Matriks Analisis *Narrative Policy Framework*

Komponen NPF	Pemerintah/DPR/TNI	Masyarakat Sipil
Latar *(Setting)*	Tantangan keamanan modern, ancaman siber, dinamika geopolitik, memperkuat profesionalisme dan efektivitas kinerja TNI (Kementerian Pertahanan, 26/3/2025), tindak lanjut Putusan MK 62/PUU-XIX/2021 (Mahkamah Konstitusi, 17/9/2025), transformasi	Proses revisi terburu-buru, minim partisipasi publik (pshk.go.id, 14/7/2025), risiko melanggar prinsip demokrasi sipil (Aliansi Jurnalis Independen, 17/3/2025), UU TNI sengaja tidak langsung dipublikasikan setelah disahkan, selama lima puluh enam hari (LBH Jakarta, 5/8/2025).
	keamanan Indonesia (Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, 22/7/2025).	
Tokoh *(Character)*	Pahlawan *(Hero)*: Pemerintah, DPR, TNI. Penjahat *(Villain)*: Ancaman siber dan geopolitik. Korban *(Victim)*: Masyarakat Indonesia dan	Pahlawan *(Hero)*: Masyarakat sipil, publik. Penjahat *(Villain)*: Pemerintah, DPR dan TNI yang dianggap mengabaikan prosedur dan mengikis supremasi sipil. Korban *(Victim)*: Demokrasi sipil dan akuntabilitas pemerintah.
Alur *(Plot)*	Ancaman keamanan memicu revisi UU TNI, yang kemudian prosedurnya dijalankan untuk memastikan profesionalisme TNI tetap terjaga.	Revisi UU TNI terburu-buru, tahap formal dilangkahi, partisipasi publik terhambat, risiko melemahkan demokrasi
Amanat *(Moral of The Story)*	Revisi UU TNI sah, prosedural, dan penting untuk menghadapi tantangan keamanan baru	Revisi UU TNI harus transparan dan partisipatif; jika tidak, kehilangan legitimasi demokratis

Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber.

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH



Sumber Gambar: Google

Bagaimana relasi kuasa bekerja?

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

VERTIKAL:

menyangkut siapa yang memegang otoritas formal dan bagaimana mereka menggunakannya.

- **Pemerintah dan DPR memonopoli proses pembahasan; minim partisipasi → wacana resmi nyaris tidak terbantahkan.**
- **Penyusunan dilakukan secara cepat dan tertutup, mempersempit ruang masyarakat sipil.**
- **Negara menggunakan otoritas hukum, militer dll (termasuk regulasi) untuk membingkai revisi sebagai “kebutuhan keamanan nasional.” dan membungkam suara.**

Negara mengendalikan jalur formal untuk mendefinisikan apa itu "ancaman" dan “kebutuhan mendesak,” sehingga narasi tandingan tidak ikut masuk ke produk regulasi.

HORIZONTAL:

bagaimana negara menguasai ruang produksi wacana di luar gedung parlemen: media, digital, dan opini publik..

- **Narasi keamanan (cyber threat, geopolitik, stabilitas nasional) didorong terus menerus oleh pejabat tinggi, juru bicara, dan media arus utama.**
- **Kritik masyarakat sipil dibalas dengan narasi defensif.**
- **Pengerahan penggaung (jasa penggiring opini).**

Negara mengendalikan jalur formal untuk mendefinisikan apa itu "ancaman" dan “kebutuhan mendesak,” sehingga narasi tandingan tidak ikut masuk ke produk regulasi.



Bukti Konkret “Militerisasi”

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Tabel 2. Perwira TNI Aktif di Jabatan Sipil (Per Juni 2025)

Nama	Jabatan
Mayor Teddy Indra Wijaya (TNI AD)	Sekretaris Kabinet Merah Putih
Mayjen Maryono (TNI AD)	Inspektur Jenderal Perhubungan Darat
Mayjen Irham Waroihan (TNI AD)	Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian
Laksamana Ian Heriyawan (TNI AL)	Badan Penyelenggara Haji
Mayjen Nugraha Gumilar (TNI AD)	Direktur Utama Perum Bulog (7 Februari–30 Juni 2025)
Jenderal Maruli Simanjuntak (TNI AD)	Komisaris Utama PT Pindad
Laksamana Muhammad Ali (TNI AL)	Komisaris Utama PT PAL Indonesia

Sumber: Film Dokumenter Dirty Vote II o3





Praktiknya justru bertolak belakang dengan narasi meningkatkan “profesionalisme” TNI

Kesimpulan

- **Revisi UU TNI bukan sekadar kebutuhan keamanan, melainkan produk kontestasi naratif dan konsolidasi kekuasaan.**
- **Negara berhasil membangun hegemoni melalui narasi keamanan → militerisasi ruang sipil jadi tampak wajar.**
- **Ruang partisipasi publik semakin terpinggirkan.**

Bagaimana dampak jangka panjang terhadap demokrasi?



REKOMENDASI

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

1.Perkuat Pengawasan Sipil atas TNI

DPR dan Komisi I perlu memastikan implementasi revisi UU TNI tetap tunduk pada prinsip demokrasi dan kontrol sipil. Kemhan harus membuka transparansi anggaran dan melibatkan publik dalam evaluasi program non-pertahanan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dengan lembaga sipil.

2. Reformasi Tata Kelola Ekonomi Militer

BPK dan KPK harus melakukan audit menyeluruh atas kegiatan ekonomi TNI, terutama di proyek strategis yang rawan konflik kepentingan. Hasil audit harus dipublikasikan dan ditindaklanjuti secara hukum. Kemenkeu perlu menerapkan sistem transparansi lintas sektor untuk semua proyek yang melibatkan TNI.

3. Lindungi Ruang Ekspresi dan Media Independen

Komdigi dan lembaga terkait harus meninjau ulang regulasi digital yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi, dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil seperti SAFEnet, AJI, dan LBH Pers. Media perlu memperkuat kolaborasi lintas redaksi untuk membangun basis data investigatif tentang relasi militer–bisnis–politik.

REKOMENDASI

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

4. Perkuat Advokasi dan Narasi Publik Masyarakat Sipil

Koalisi masyarakat sipil perlu membentuk gugus tugas lintas sektor untuk memonitor dampak revisi UU TNI. Advokasi harus berjalan melalui dua jalur:

- Kebijakan: dialog dengan DPR dan kementerian melalui policy brief, hearing, dan laporan publik.
- Kultural: kampanye kreatif—podcast, komik digital, film pendek, serta penguatan kampus sebagai ruang kritik dan produksi wacana tandingan, agar kesadaran publik tentang kontrol sipil tumbuh lebih luas.



THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute,
Center for Public Policy Research (TII)
Jl. HOS Cokroaminoto No. 92, Menteng
Jakarta Pusat 10310- (021)-315 8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

Twitter : @the_indonesian
Instagram : @indonesian.institute
FB : Tii Jakarta
YouTube : The indonesian institute